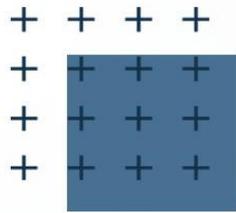


DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN



AIDIL AKBAR, M.PD

DISTRIBUSI PENDAPATAN DAN KEMISKINAN

A. Tujuan pembelajaran

1. Ketepatan dalam menganalisis distribusi pendapatan di suatu negara dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksetaraan pendapatan serta memberikan penjelasan yang mendalam mengenai dampaknya pada masyarakat.
2. Ketepatan dalam menganalisis indeks ketidaksetaraan seperti Indeks Gini dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau visualisasi data yang relevan untuk menggambarkan distribusi pendapatan.
3. Ketetapan dalam menganalisis Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya.

B. Uraian Materi

1. Distribusi Pendapatan

Pada dasarnya, tujuan utama dari pembangunan ekonomi dalam suatu negara adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang stabil serta distribusi pendapatan yang merata memiliki dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan dasar seperti makanan dan kebutuhan lainnya. Dalam teori ekonomi, terdapat Hukum Engel yang menyatakan bahwa ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, proporsi dari pendapatan yang digunakan untuk membeli makanan cenderung menurun. Dengan kata lain, semakin sejahtera suatu populasi, semakin besar alokasi pengeluaran yang digunakan untuk barang dan jasa non-makanan.

Contoh dari dampak Hukum Engel ini dapat ditemukan dalam pengalaman Indonesia. Selama beberapa dekade terakhir, terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia, yang menyebabkan banyak keluarga meningkatkan standar hidup mereka. Hal ini tercermin dalam perubahan pola konsumsi masyarakat, di mana sebagian besar keluarga mulai mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk kebutuhan non-makanan seperti pendidikan, perumahan yang lebih baik, transportasi, dan hiburan. Perubahan ini mencerminkan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang telah dicapai berkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Distribusi pendapatan di suatu wilayah juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi masyarakat. Ketika pendapatan didistribusikan dengan baik, wilayah tersebut dapat

mengalami perubahan positif seperti penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, dan perbaikan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, jika distribusi pendapatan tidak merata, hanya sebagian kecil masyarakat yang akan mengalami kemakmuran, sementara sebagian besar lainnya mungkin akan tetap berada dalam kondisi sulit.

Penting untuk memahami bahwa terdapat suatu keseimbangan atau trade-off antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang merata. Saat pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, seringkali distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata. Ini berarti bahwa dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, perlu ada langkah-langkah khusus untuk memastikan distribusi pendapatan yang lebih merata.

Sebagai contoh, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa tahun terakhir, tetapi dalam beberapa kasus, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan adil, di mana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini dapat dicapai melalui kebijakan redistribusi pendapatan, pelatihan keterampilan bagi kelompok yang rentan, dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Dengan kata lain, penting bagi suatu daerah atau negara untuk mencari keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang cepat dan distribusi pendapatan yang merata demi menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakatnya.

Para ahli telah mengamati bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya meningkatkan ketimpangan relatif, tetapi juga dapat mengakibatkan penurunan taraf hidup absolut bagi golongan miskin. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang cepat dapat berdampak negatif pada kesenjangan relatif antara kelompok masyarakat dan juga dapat membuat kelompok miskin mengalami penurunan kualitas hidup mereka. Sebagai contoh, ketika sebuah negara mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, kelompok kaya cenderung mendapatkan manfaat lebih besar daripada kelompok miskin. Ini dapat mengakibatkan perbedaan yang lebih besar antara pendapatan kelompok kaya dan miskin, yang merupakan contoh dari ketimpangan relatif yang meningkat

Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dapat membawa manfaat distribusi pendapatan jika ada kebijakan yang tepat. Misalnya, ketika pemerintah menerapkan program-program redistribusi pendapatan atau pelatihan keterampilan bagi kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi yang awalnya meningkatkan ketimpangan relatif dapat berbalik menuju pemerataan pendapatan.

Salah satu contoh dari pola ini adalah pengalaman beberapa negara berkembang seperti Korea Selatan. Awalnya, Korea Selatan mengalami ketimpangan yang cukup besar dalam distribusi pendapatan selama periode pertumbuhan ekonomi awal mereka. Namun, dengan kebijakan yang tepat, termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan, mereka berhasil mencapai pemerataan yang lebih besar dalam distribusi pendapatan seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, penting untuk memahami bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan dapat berubah seiring waktu, tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Permasalahan ketimpangan dalam distribusi pendapatan dapat dilihat dari tiga aspek yang berbeda:

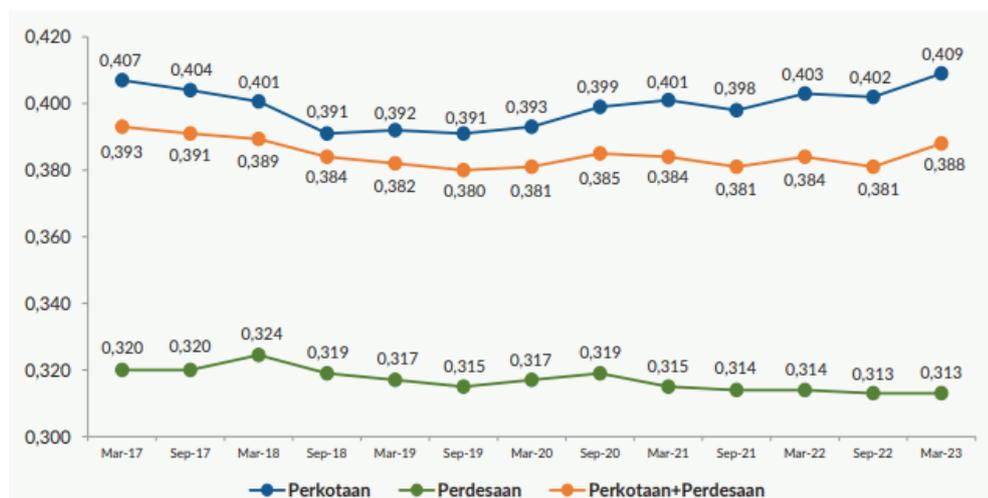
1. Distribusi Pendapatan Antar Golongan Pendapatan (Ketimpangan Relatif): Ketimpangan ini merujuk pada perbedaan pendapatan antara kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya, ketika sebagian kecil penduduk memiliki sebagian besar pendapatan nasional sementara sebagian besar penduduk lainnya berada dalam kondisi miskin atau memiliki pendapatan yang sangat rendah.
2. Distribusi Pendapatan Antara Daerah Perkotaan dan Pedesaan (Kesenjangan Pendapatan Kota dan Desa): Pola pembangunan yang lebih berfokus pada perkotaan daripada pedesaan sering menghasilkan ketimpangan pendapatan yang signifikan. Di negara seperti Indonesia, ketika sektor industri dan pengembangan terpusat di perkotaan, pendapatan penduduk perkotaan cenderung lebih tinggi daripada penduduk pedesaan. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam pendapatan dan taraf hidup antara dua wilayah ini.
3. Distribusi Pendapatan Antar Daerah (Kesenjangan Pendapatan Regional): Ketimpangan dalam pertumbuhan ekonomi antar berbagai wilayah di suatu negara juga dapat mengakibatkan ketimpangan pendapatan. Ketika beberapa daerah mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat sementara daerah lain tertinggal, akan terjadi perbedaan dalam pendapatan per kapita antar daerah tersebut.

Sebagai contoh, Indonesia mengalami ketimpangan pendapatan antara pulau-pulau yang berbeda. Pulau-pulau yang memiliki industri dan infrastruktur yang berkembang lebih pesat, seperti Jawa, umumnya memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibandingkan dengan pulau-pulau yang kurang berkembang.

Penting untuk dicatat bahwa ketimpangan pendapatan ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah sering kali berusaha untuk mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan, seperti program redistribusi atau investasi dalam pengembangan wilayah tertinggal.

Secara nasional, sejak Maret 2017, angka Gini Ratio terus mengalami penurunan hingga September 2019, menunjukkan perbaikan dalam pemerataan pengeluaran penduduk Indonesia selama periode tersebut. Namun, selama masa pandemi COVID-19, yaitu pada Maret 2020 dan September 2020, terjadi kenaikan angka Gini Ratio. Setelah tahun 2020, angka Gini Ratio mengalami fluktuasi dan mencapai 0,388 pada Maret 2023 (Gambar 4.1)

Dilihat dari segi daerah, Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 adalah 0,409, mengalami kenaikan sebesar 0,007 poin dari September 2022 yang sebesar 0,402 dan kenaikan 0,006 poin dari kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,403. Sementara itu, Gini Ratio di perdesaan pada September 2022 adalah 0,313, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan kondisi di September 2022, dan mengalami penurunan sebesar 0,001 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 yang sebesar 0,314.



Gambar 4.1 Perkembangan Gini Ratio Maret 2017–Maret 2023

(Sumber : BPS, di akses pada tanggal 16 september 2023)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh. Manfaat dari data Gini Ratio adalah untuk melihat ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk di suatu wilayah dengan interpretasi sebagai berikut : Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1. Nilai Rasio Gini yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Rasio Gini bernilai

0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Rasio Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Rasio Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

2. Kemiskinan

Kesenjangan ekonomi, atau disebut juga sebagai ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah, serta tingkat kemiskinan yang mengacu pada jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan (poverty line), merupakan dua isu yang signifikan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kemiskinan bisa diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik dalam aspek materi maupun non-materi. Definisi kemiskinan seringkali relatif, diukur dengan membandingkan kondisi seseorang dengan kondisi miskin orang lain dalam masyarakat. Misalnya, seseorang dianggap miskin jika pendapatannya jauh di bawah rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya.

Dalam definisi yang lebih umum, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan dapat menyebabkan kemiskinan. Ini adalah masalah global yang memengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Definisi kemiskinan dapat bervariasi tergantung pada perspektif individu, moral, evaluatif, atau ilmiah. Namun, intinya adalah bahwa kemiskinan mengacu pada kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang mengarah pada kondisi kehidupan yang sulit bagi individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Kemiskinan dapat dipahami melalui berbagai perspektif yang mencakup:

1. **Kemiskinan Materi:** Ini mengacu pada kekurangan bahan dan pelayanan dasar seperti makanan, sandang, perumahan, dan perawatan kesehatan. Kemiskinan dalam konteks ini terkait dengan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan materi dasar.
2. **Kemiskinan Sosial:** Ini mencakup aspek sosial, seperti keterkucilan dari masyarakat, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Hal

ini juga dapat mencakup masalah pendidikan dan akses terhadap informasi. Keterkucilan sosial sering kali melibatkan masalah politik dan moral, yang tidak selalu terkait dengan aspek ekonomi.

3. Kemiskinan Pendapatan dan Kekayaan: Dalam pengertian ini, kemiskinan merujuk pada kurangnya pendapatan dan kekayaan yang memadai. Definisi "memadai" dapat bervariasi secara signifikan tergantung pada konteks politik dan ekonomi di berbagai wilayah.

Berdasarkan sudut pandang ini, terdapat tiga pengertian utama tentang kemiskinan:

1. Kemiskinan Absolut: Seseorang dianggap miskin secara absolut jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, yang artinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, kesehatan, tempat tinggal, dan pendidikan.
2. Kemiskinan Relatif: Seseorang dianggap miskin relatif jika, meskipun pendapatannya berada di atas garis kemiskinan, dia masih memiliki tingkat kehidupan yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat sekitarnya.
3. Kemiskinan Kultural: Jenis kemiskinan ini terkait dengan sikap atau budaya di mana seseorang atau sekelompok masyarakat mungkin enggan untuk berusaha meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan jika ada upaya dari pihak lain yang mencoba membantu.

Secara keseluruhan, selama periode dari September 2012 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dalam hal jumlah maupun persentase. Terdapat beberapa peningkatan yang mencolok pada bulan September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan-bulan tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa faktor, seperti kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak pada waktu tertentu. Selain itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2020 dan September 2020 terjadi selama periode pembatasan mobilitas penduduk yang diterapkan dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia. (Gambar 4.2) menunjukkan perkembangan tingkat kemiskinan dari bulan September 2012 hingga Maret 2023.



Gambar 4.2 perkembangan tingkat kemiskinan dari bulan September 2012 hingga Maret 2023.

(Sumber : BPS, di akses pada tanggal 16 september 2023)

2.1 Pendekatan dalam Pengukuran Kemiskinan

Strategi kebutuhan dasar (basic needs), seperti yang dikemukakan oleh Thee Kian Wie (1981: 29), diperkenalkan dan diadvokasi oleh International Labor Organisation (ILO) pada tahun 1976 melalui dokumen berjudul "Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kebutuhan Dasar: Suatu Isu Global". Pendekatan strategi kebutuhan dasar menekankan upaya langsung dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar mengandalkan efek "menetes ke bawah" (trickle-down effect) dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Penggunaan indikator kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan memiliki sejumlah tantangan.

Salah satunya adalah subjektivitas dalam menentukan standar atau kriteria, yang bisa dipengaruhi oleh adat, budaya, wilayah geografis, dan kelompok sosial. Selain itu, pengukuran kuantitatif dari setiap komponen kebutuhan dasar juga seringkali sulit karena dapat dipengaruhi oleh sifat yang beragam dari masing-masing komponen tersebut. Sebagai contoh, preferensi individu terhadap jenis makanan atau barang konsumsi tertentu dapat bervariasi secara signifikan.

Sebagai ilustrasi, dalam mengukur kemiskinan dengan pendekatan kebutuhan dasar, perlu mempertimbangkan perbedaan budaya dan sosial di berbagai wilayah. Misalnya, di beberapa daerah, akses ke air bersih mungkin dianggap sebagai kebutuhan dasar, sementara di tempat lain, akses ke listrik atau pendidikan yang berkualitas lebih diutamakan. Oleh

karena itu, pengukuran efektif dari kebutuhan dasar harus memperhitungkan konteks lokal dan berbagai faktor yang memengaruhinya.

Pada bulan Maret 2023, jumlah penduduk yang hidup dalam kondisi miskin di Indonesia mencapai 25,90 juta orang. Dalam perbandingan dengan bulan September 2022, terjadi penurunan sebanyak 0,46 juta orang dalam jumlah penduduk miskin. Selain itu, jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022, jumlah penduduk miskin juga mengalami penurunan sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk yang hidup dalam kemiskinan pada bulan Maret 2023 mencapai 9,36 persen, yang mengalami penurunan sebanyak 0,21 persen poin jika dibandingkan dengan bulan September 2022, dan penurunan sebanyak 0,18 persen poin jika dibandingkan dengan bulan Maret 2022.

Apabila dilihat dari lokasi tempat tinggal, selama periode dari bulan September 2022 hingga Maret 2023, jumlah penduduk miskin di perkotaan mengalami penurunan sebanyak 0,24 juta orang, sementara di perdesaan mengalami penurunan sebanyak 0,22 juta orang. Persentase kemiskinan di perkotaan menurun dari 7,53 persen menjadi 7,29 persen. Sementara itu, di perdesaan, persentase kemiskinan juga mengalami penurunan dari 12,36 persen menjadi 12,22 persen.

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)
Perkotaan		
Maret 2022	11,82	7,50
September 2022	11,98	7,53
Maret 2023	11,74	7,29
Perdesaan		
Maret 2022	14,34	12,29
September 2022	14,38	12,36
Maret 2023	14,16	12,22
Total		
Maret 2022	26,16	9,54
September 2022	26,36	9,57
Maret 2023	25,90	9,36

Tabel 4.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2022–Maret 2023

(Sumber : BPS, di akses pada tanggal 16 september 2023)

Pada bulan Maret 2023, terdapat kesamaan dalam komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar terhadap Garis Kemiskinan (GK), baik di perkotaan maupun di perdesaan. Beras tetap menjadi kontributor terbesar, menyumbang sekitar 19,35

persen di perkotaan dan 23,73 persen di perdesaan. Di posisi kedua, rokok kretek filter memberikan kontribusi terbesar, yakni sekitar 12,14 persen di perkotaan dan 11,34 persen di perdesaan. Selain itu, terdapat komoditas lain seperti daging ayam ras (sekitar 4,53 persen di perkotaan dan 2,93 persen di perdesaan), telur ayam ras (sekitar 4,22 persen di perkotaan dan 3,34 persen di perdesaan), mie instan (sekitar 2,56 persen di perkotaan dan 2,24 persen di perdesaan), gula pasir (sekitar 1,69 persen di perkotaan dan 2,35 persen di perdesaan), dan seterusnya.

Adapun komoditas bukan makanan yang memberikan kontribusi signifikan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, meliputi perumahan (sekitar 8,81 persen di perkotaan dan 8,38 persen di perdesaan), bensin (sekitar 3,96 persen di perkotaan dan 3,78 persen di perdesaan), serta listrik (sekitar 3,10 persen di perkotaan dan 1,78 persen di perdesaan). Urutan selanjutnya mencakup kontribusi dari sektor pendidikan, perlengkapan mandi, perawatan kulit, wajah, kuku, dan rambut, sabun cuci, serta pakaian jadi untuk perempuan dewasa. Hal ini dapat di lihat dalam table 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Daftar Komoditas yang Memberi Sumbangan Besar terhadap Garis Kemiskinan beserta Kontribusinya (%), Maret 2023

Jenis Komoditas	Perkotaan	Jenis Komoditas	Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Makanan:	73,00	Makanan:	76,08
Beras	19,35	Beras	23,73
Rokok kretek filter	12,14	Rokok kretek filter	11,34
Daging ayam ras	4,53	Telur ayam ras	3,34
Telur ayam ras	4,22	Daging ayam ras	2,93
Mie instan	2,56	Gula pasir	2,35
Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	2,00	Mie instan	2,24
Roti	1,95	Bawang merah	2,12
Bawang merah	1,90	Kopi bubuk & kopi instan (sachet)	1,87
Kue basah	1,85	Roti	1,86
Tempe	1,77	Cabe rawit	1,84
Tahu	1,71	Tongkol/tuna/cakalang	1,78
Gula pasir	1,69	Kue basah	1,76
lainnya	17,33	lainnya	18,92
Bukan Makanan:	27,00	Bukan Makanan:	23,92
Perumahan	8,81	Perumahan	8,38
Bensin	3,96	Bensin	3,78
Listrik	3,10	Listrik	1,78
Pendidikan	1,94	Pendidikan	1,19
Perlengkapan mandi	1,29	Perlengkapan mandi	1,14
Perawatan kulit, muka, kuku, rambut	0,69	Sabun cuci	0,74
Pakaian jadi perempuan dewasa	0,69	Pakaian jadi perempuan dewasa	0,68
lainnya	6,52	lainnya	6,23

(Sumber : BPS, di akses pada tanggal 16 september 2023)

C. RANGKUMAN

Analisis distribusi pendapatan di suatu negara adalah elemen penting dalam memahami ketidaksetaraan ekonomi. Faktor-faktor yang memengaruhi ketidaksetaraan pendapatan, seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan kebijakan ekonomi, memainkan peran kunci dalam membentuk pola distribusi tersebut. Dampak dari ketidaksetaraan pendapatan pada masyarakat sangat signifikan, dengan potensi untuk menciptakan disparitas dalam akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan peluang ekonomi.

Selanjutnya, dalam menganalisis ketidaksetaraan pendapatan, indeks seperti Indeks Gini digunakan untuk mengukur sejauh mana distribusi pendapatan merata atau tidak. Penggunaan visualisasi data seperti grafik dapat membantu memvisualisasikan dengan jelas tingkat ketidaksetaraan ini, sehingga memudahkan pemahaman terhadap perubahan-perubahan dalam distribusi pendapatan dari waktu ke waktu.

Selain itu, penting juga untuk menganalisis komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap garis kemiskinan. Ini memberikan wawasan tentang komponen-komponen utama yang memengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah. Misalnya, dalam banyak kasus, bahan pangan seperti beras dan rokok dapat memiliki dampak yang signifikan pada tingkat kemiskinan, dan pemahaman ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang distribusi pendapatan, indeks ketidaksetaraan, dan komoditas yang berperan besar dalam tingkat kemiskinan adalah elemen-elemen penting dalam analisis ekonomi yang komprehensif dan berkontribusi pada upaya-upaya perbaikan dan pengentasan kemiskinan di suatu negara.

D. TUGAS/LATIHAN SOAL

1. Daftar komoditas yang memberi sumbangan besar terhadap garis kemiskinan beserta kontribusinya salah satu yang terbesar adalah beras. Perhatikan data BPS berikut ini:

Kualitas Beras	Rata-Rata Harga Beras Bulanan di Tingkat Penggilingan Menurut Kualitas (Rupiah/Kg)												
	2023												
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Tahunan
Premium	11345.10	11818.17	11681.09	11672.19	11623.61	11525.14	11537.44	11754.39	12900.47	-	-	-	-
Medium	10801.71	11300.76	11121.88	11049.87	11005.56	11079.92	11120.58	11474.96	12685.36	-	-	-	-
Luar Kualitas	10227.61	10467.91	10475.91	10564.51	10428.81	10315.48	10302.59	10525.23	11745.50	-	-	-	-

Dari data di atas, lakukan analisis dampak dari kenaikan harga beras tersebut terhadap garis kemiskinan!

2. Mengapa penting untuk memahami distribusi pendapatan dalam konteks ekonomi? Bagaimana ketidaksetaraan pendapatan dapat memengaruhi masyarakat secara keseluruhan? Berikan contohnya.
3. Bagaimana pandemi COVID-19 memengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia? Jelaskan dampak-dampak ekonomi yang muncul akibat COVID-19.